

Islam melihat pembangunan menurut pengertian yang luas dan menyeluruh dengan menekankan pembangunan insan manusia seutuhnya (human development). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya -pembangunan yang bermaksud menyusun rumusan dibidang ekonomi dan lain-lain. (Anwar Ibrahim, 1997 : 63).

Dengan demikian tugas penting dalam teori pembangunan ekonomi adalah mengkaji dan menjelaskan sifat dan proses pembangunan dan faktor-faktor lain yang terkait, juga mengidentifikasikan dan menganalisa kendala-kendala utama dalam situasi tertentu, serta mencarikan jalan keluar yang efektif sehingga tercapai pola-pola pembangunan ekonomi. Usaha ini harus dilakukan dengan penuh semangat akademis dan ilmiah.

Ilmu ekonomi pembangunan sekarang ini menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Ia menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan mulai skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pembangunan kontemporer. Sebagian berpendapat, bahwa teori yang didapat dari pengalaman pembangunan barat kemudian diterapkan di negara-negara yang kurang berkembang jelas tidak sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri-karena mengandung unsur-unsur penyederhanaan, abstraksi dan berbagai kepalsuan lainnya.

Untuk itu Islam sangat memperhatikan masalah pemban-

gunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk "*meng-Islamkan ekonomi*" mulai dari seminar, konferensi; penerbitan literatur, pusat riset sampai ke bidang pendidikan. Dan sampai penghargaan (*award*) diberikan kepada yang mempunyai gagasan atau sumbangan yang besar pada konsep ini.

Gagasan ekonomi Islam, dimaksudkan sebagai pengganti dari sistem ekonomi kapitalis-sosialis yang bukan saja tidak sejalan dengan ajaran Islam, namun juga gagal memecahkan berbagai problem ekonomi yang dihadapi terutama oleh negara-negara dunia ketiga. Sistem ekonomi Islam ini diharapkan mencegah ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber agar dapat memberikan kepuasan kepada manusia. Dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah. Islam mewajibkan zakat dan mengharamkan riba, mengizinkan kepemilikan pribadi, tetapi juga memberikan hak kepada masyarakat untuk menyebarkan (*mentasyarubkan*) kembali kekayaan pribadi, melarang pemilikan tanah yang diluar kemampuan seseorang atau keluarganya untuk mengelo-

barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. (Monzer Kuht, 1995 : 2). Sementara WJS Poerwodarminto (1976 : 267) menyebut bahwa ekonomi merupakan suatu pengetahuan dan penyelidikan tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Selanjutnya, tentu saja --menurutnya pula-- ini relatif berbeda dengan apa yang disebut perekonomian, keekonomian, terlebih berekonomi yang cenderung bermakna operasional-implimentatif.

Dari sini dapat dimengerti bahwa bidang bahasan ekonomi adalah satu faktor dari perilaku manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini tampak jelas dari komparasi antara definisi ekonomi dengan agama, dimana yang disebut mula memperbincangkan tatanan dari lingkup cakupan yang disebut kemudian. Itu artinya, setiap agama (umumnya) memiliki ajaran sendiri mengenai cara manusia mengorganisasikan kegiatan ekonomi pengamatnya, tak terkecuali Islam.

2. Re-definisi Ekonomi Islam

Suatu persoalan yang mendasar timbul tatkala ekonomi (menurut) Islam diurai secara definitif. Menurut Muhammad Abdul Manawi (1993 : 13), bahwasanya selalu terjadi semacam "disinterpretasi" yang

dalam hal tertentu, semisal hukum (waris), ia hanya menyinggung satu dua statement dan atau "*alternative solving*" secara global yang langsung-tak langsung mengajak umat Islam mengembangkannya dan melakukan upaya interpretatif dalam rangka pengabstraksian konsep, teori, dan definisi-definisi (dalam arti luas) berdasar prinsip-prinsip dasar yang dimaklumkan al-Quran dengan sembari memperhatikan fenomena kehidupan yang tengah berlangsung. Kenyataan ini tak jauh berbeda dengan sumber kedua, sunnah Nabi, lalu dari sini bisa diambil satu logika awal bahwa sebenarnya tidak ada sama sekali teori atau konsep Ekonomi Islam yang tertulis dan tertata dalam pengertianannya yang ketat dengan satu "*Kodifikasi*".

Itulah mengapa, Monzer Kaht (1995 : 11) memberi satu penegasan bahwa segala apa yang dianggap konsepsi Ekonomi Islam pada dasarnya bukanlah pandangan Islam (dalam artian mutlak dan tertentu, pen.), tetapi ia tak lebih sekedar pandangan orang (sarjana, intelektual, ulama) muslim yang berplatformkan al-Quran dan as-Sunnah. Sebab bagaimanapun --mengu- tip Kaht lagi-- berbagai realitas implikasi dari kondisi ruang dan waktu yang berbeda diantara mereka terhadap teoritisasi (Ekonomi Islam) tersebut tak dapat dipungkiri.

anggapan dikalangan para Ekonom Muslim, perkataan sistem diartikan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks; suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan (WJS Poerwodarminto, 1976 : 955). Sementara "ilmu" menurut Poerwodarminto - adalah pengetahuan yang dirumuskan tentang segala hal, fisik maupun meta fisik (1976 :267). Sejalan dengan definisi sistem ini dapat dikatakan bahwa Ekonomi Islam sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasar empat bagian pengetahuan, yakni pengetahuan yang diwahyukan (al-Quran), teori dan praktek Rasul (as-Sunnah - al-Hadits), deduksi analogik, penafsiran berikutnya dan konsensus bersama (ijma'). Sistem ini memuat suatu mekanisme yang built-in sebagai upaya-upaya pemikiran (ijtihad) tentang beragam persoalan baru, sepanjang jauh tidak kontradiktif dengan komponen dasar dari sistem itu. (Muhammad Abdul Manan, 1993 : 16). Dengan demikian jelas bahwa suatu sistem (Ekonomi Islam) memuat prinsip-prinsip yang juga mengatur seluruh tata kehidupan. Prinsip tersebut (al-Quran dan as-Sunnah) harus didudukkan dalam suatu kerangka yang mutlak.

Menurut M.A. Manan (1993 :16) dari prinsip-prinsip tersebut dapat dikembangkan suatu kerangka

yang mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya, dan kemungkinannya untuk berkembang dan tumbuh sebagai konsekuensi-nya suatu sistem yang mendukung Ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam terhadap Kehidupan. (Monzer Kaht, 1995 : 5).

Dengan sistematis diartikan bahwa kita hendaknya dapat menggolongkan nilai-nilai menurut hirarki tertentu sehingga dapat menarik hubungan-hubungan nilai dan interaksinya dan dengan demikian eksistensinya suatu sistem dapat dijelaskan. Hirarki nilai-nilai secara aksiologis menunjukkan kepada kita hirarki strategi dan taktik untuk suatu kerangka referensi yang selalu berubah, maupun yang bersifat mutlak. Oleh karena itu sistematisasi hierarki nilai dari suatu sistem pada dasarnya sama, yang membedakan ialah substansi nilai tersebut yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu. Bagaimanapun juga pembicaraan ekonomi dan nilai berkaitan dengan manusia. Oleh karena itu, untuk melihat nilai islami pada manusia, perlu menelusuri bagaimana pandangan Islam tentang manusia dan bagaimana pula pandangan Muslim terhadap Islam yang dianutnya.

Islam memandang manusia dari unsur jasmani dan

rohani, dan kebutuhan antara keduanya harus seimbang. Jadi tujuan yang dicapai manusia menurut konsep Islam adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan melalui pemenuhan secara seimbang antara jasmani dan rohani. Itu berarti mencapai kebutuhan tertinggi melalui penyempurnaan diri sebagai manusia (insan kamil). Al-Farabi dalam tulisannya Muhtar Ahnad (Ulumul Quran edisi 9, vol 11, 1991 : 8-9) mengatakan, bahwa 'kesempurnaan manusia hanya pada tingkat individual. Ia berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mencapai taraf kesempurnaan yang diciptakan menurut alam fitrahnya saja, kecuali dengan hidup bermasyarakat, saling membantu, dan bekerja sama satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dari uraian diatas, bila dihubungkan dengan ekonomi, maka Islam secara mendasar jelas mengakui hak-hak individual dan masyarakat (umum) serta perlunya kerja sama dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan agar dapat mencapai taraf kesempurnaan. Jadi Islam tidak hanya mementingkan akan hak-hak individu dan persaingan secara bebas atau hanya mengenal hak-hak masyarakat yang diwakili negara atau oleh penguasa dengan perjuangan kelas dalam sistem komunis. Maka fungsi sistem Ekonomi Islam adalah untuk memecahkan masalah ekono-

dalam pelaksanaan monopoli adalah bahwa ia akan menurunkan harga atas barang-barang produksinya dan meningkatkan outputannya pada tingkatan yang sesuai sebagaimana yang terdapat dalam perusahaan persaingan sempurna dengan syarat ia mengurangi keuntungan yang diperolehnya pada tahap yang tidak melebihi tingkat keuntungan normal. Dan perlu dicatat, monopoli timbul mengakibatkan persaingan-persaingan (persaingan sehat) tidak hanya pemborosan sumber daya tetapi peningkatan dalam sumber daya. Begitu juga usaha spekulatif, dibolehkan sejauh spekulasi memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak, tetapi apabila para spekulan mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan banyak, apabila dengan cara menciptakan kelangkaan barang dan komoditas secara dibuat-buat. Transaksi masa depan perdagangan internasional dan banting harga, perdagangan dan bunga, diperbolehkan oleh Islam asal memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada kepentingan sosial, tetapi persoalan "bunga", Islam tetap melarang.